

Ijtihad Ulama Indonesia: Antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi Perbandingan Ijtihad Terhadap Permasalahan Fiqih Kontemporer)

Oleh: Bani S. Maula

ABSTRAK

Ulama klasik—dan juga para pendukungnya di masa sekarang—memandang bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang sulit dilakukan, mengingat syarat-syaratnya yang sangat ketat, karena itulah umat Islam cukup merujuk kepada pendapat ulama terdahulu (*taqlid*) untuk menentukan suatu hukum. Ulama modern berpendapat sebaliknya dan tidak membolehkan *taqlid*. Inilah yang menjadi landasan pemikiran antara Muhammadiyah, yang dipandang sebagai organisasi modernis, dan NU, sebagai organisasi tradisional. Namun ketika menghadapi permasalahan fiqih kontemporer yang memang belum ditentukan atau disebutkan secara eksplisit dalam *nass* dan fiqih-fiqih klasik, baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama telah menggunakan metode ijtihad yang berasal dari ulama klasik. Muhammadiyah tidak lagi menggunakan ijtihad hanya dengan metode *tarjih*, demikian juga NU tidak lagi mengembalikan permasalahan hukum kepada fiqih klasik secara *qauliy*. Dengan demikian kedua organisasi tersebut bisa dikatakan sama-sama melakukan *taqlid manhaji* terhadap ulama masa lalu (mengambil metode ijtihad ulama klasik, tetapi meninggalkan pendapat mereka secara *qauliy*).

Kata-kata kunci: Ijtihad, Fiqih Kontemporer, NU, Muhammadiyah

A. Pendahuluan

Masyarakat pada dasarnya mempunyai watak dinamis dan tidak berkarakter statis. Apa yang disebut sebagai perubahan sosial dalam istilah sosiologi, kapan dan di mana pun akan selalu terjadi. Perubahan ini dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat. Bagi umat Islam, kenyataan ini dapat menimbulkan masalah terutama apabila perubahan itu berkaitan dengan norma-norma agama. Karena itulah, pemecahan atas masalah tersebut diperlukan, sehingga pembaharuan dalam hukum Islam akan selalu dituntut.

Dalam upaya pembaharuan hukum Islam, pelaksanaan *ijtihad* merupakan suatu cara yang sangat penting, karena masalah perubahan dan pembaharuan hukum Islam sangat erat kaitannya dengan masalah *ijtihad*. Namun demikian, pelaksanaan *ijtihad* tidaklah mudah, karena ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Dalam masalah ketentuan *ijtihad* ini ada dua pandangan, yaitu pandangan ulama klasik dan pandangan ulama modern.

Ulama klasik (*salaf*) berpandangan bahwa *ijtihad* merupakan sesuatu yang sulit dilakukan mengingat syarat-syaratnya yang sangat ketat, terutama *ijtihad mutlaq*.

Selain itu, di kalangan mereka ada anggapan bahwa semua permasalahan hukum telah dibahas oleh ulama terdahulu sehingga tidak perlu lagi dilakukan *ijtihad*. Umat Islam cukup merujuk kepada pendapat ulama terdahulu atau mengkiaskan kepada pendapat mereka (Khallaf, 1994:128). Sedangkan ulama modern (*khalaf*) berpendapat sebaliknya. *Ijtihad* merupakan sesuatu yang mesti dilakukan sebagai upaya *tajdid* (pembaharuan) di bidang hukum Islam. Kalau *ijtihad* tidak bisa dilakukan sendiri, maka akan lebih baik jika dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*). Dua pandangan mengenai *ijtihad* tersebut telah mempengaruhi pola pikir umat Islam sampai sekarang, karena dalam kenyataannya pengikut ulama salaf masih ada di masa sekarang. Di Indonesia, pengikut kedua macam pandangan tersebut juga cukup berimbang, karena itulah ketika berbicara tentang masalah *ijtihad* di Indonesia akan terkait dengan kedua macam pandangan tersebut yang masing-masing memiliki corak pemikirannya sendiri.

Dengan demikian, berbicara tentang upaya pembaharuan Hukum Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari organisasi sosial keagamaan, karena organisasi-organisasi itulah yang sering kali me-

lakukan perumusan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Selain itu masyarakat Muslim Indonesia juga sebagian besar bernaung kepada organisasi-organisasi keagamaan tersebut. Di antara banyak organisasi sosial keagamaan di Indonesia, ada dua yang cukup berpengaruh terhadap pola perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Melalui tulisan ini, penulis bermaksud untuk melihat metode ijtihad yang digunakan baik oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih-nya maupun Nahdlatul Ulama melalui *Bahsul Masa'il*-nya dalam upaya menemukan hukum terhadap permasalahan-permasalahan fiqh kontemporer, selain itu juga ingin melihat perbedaan dan persamaan dari masing-masing metode ijtihad yang digunakan oleh kedua organisasi tersebut.

B. Sekilas Tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan dua buah organisasi sosial keagamaan Islam (*jam'iyah diniyah Islamiyah*) terbesar di Indonesia. Anggota dari kedua organisasi tersebut terdapat hampir di berbagai wilayah di In-

donesia. Keduanya memiliki beberapa persamaan sekaligus perbedaan yang menjadi corak khas masing-masing organisasi. Persamaannya antara lain terletak pada jumlah anggotanya yang meliputi berbagai lapisan sosial dari mulai pejabat, pengusaha, pedagang, pegawai hingga petani dan buruh. Kedua organisasi tersebut juga memiliki kesamaan dalam sifat dan gerakan, karena keduanya merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan (Mas'udi, 1993:183-191). Adapun perbedaannya bisa dilihat dalam uraian selanjutnya.

Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 di Yogyakarta dengan tokoh utamanya adalah K.H. Ahmad Dahlan, Abdoellah Sirat, Raden Ketib Tjendana, Haji Ahmad, dan enam tokoh lainnya (Alfian, 1967: 241-247). Sedangkan NU lahir empat belas tahun kemudian, yakni tahun 1926, di Surabaya dengan pendirinya adalah K.H. Wahab Chasbullah, K.H. Hasyim Asy'ari dan kawan-kawanya (Tim Penyusun, 1993:114).

Lubis (1991:13-18) membagi dua faktor yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah, yakni faktor interen dan eksteren. Yang dimaksud faktor interen, menurutnya, adalah faktor yang berasal dari umat Islam itu sendiri, yaitu si-

kap keberagamaan umat Islam yang menurut K.H. Ahmad Dahlan masih bercampur dengan bid'ah, syirik dan takhayul. Praktek-praktek keberagamaan yang bercampur dengan budaya Jawa itu terlihat terutama di dalam masyarakat Muslim Yogyakarta. Hal yang demikian itu, menurut K.H. Ahmad Dahlan, tentu saja jauh dari ajaran Islam yang benar. Di samping praktek keberagamaan yang menurut K.H. Ahmad Dahlan bersifat heterodoks tersebut, berkembang pula sikap *taqlid* kepada salah satu mazhab. Sikap *taqlid* tersebut ditopang dan dilestarikan lewat pendidikan tradisional pesantren. Praktek keberagamaan yang demikian juga dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menurutnya memiliki watak yang dinamis (Lubis, 1991:19-25).

Adapun faktor eksternalnya adalah faktor politik kolonial Belanda yang berusaha untuk mengadakan Kristenisasi dan Westernisasi orang Jawa. Hal ini terlihat dalam sistem pendidikan Belanda yang diterapkan kepada rakyat Indonesia yang mempunyai motif-motif terselubung, yakni menyebarkan agama Kristen. Kebijakan pendidikan yang demikian tentu saja membahayakan umat Islam (Lubis, 1991:25-28).

NU yang muncul lebih belat-

kangan juga dilatarbelakangi oleh dua faktor interen maupun eksternal. Dalam bahasa Haidar (1994: 41-42), NU berdiri karena dua alasan, yaitu karena alasan keagamaan dan karena alasan politik. Yang dimaksud dengan faktor keagamaan ialah adanya paham baru yang disebarkan oleh kaum Wahhabi yang mulai berkembang di Indonesia yang dianggapnya terlalu berlebih-lebihan, karena itu NU perlu mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh tersebut. Jadi berdirinya NU adalah sebagai reaksi defensif terhadap serangan-serangan dan tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh orang-orang di Nusantara yang terpengaruh gerakan pemurnian di Timur Tengah, yakni gerakan Wahhabiyah. Agaknya yang dimaksud NU dalam hal ini di antaranya adalah Muhammadiyah, karena memang Muhammadiyah juga dipengaruhi oleh paham pemurnian tersebut. Karena itu tidak jarang tokoh-tokoh dari kedua organisasi tersebut terlibat dalam suatu perdebatan pada masalah-masalah *khilafiah* yang bersifat *furu'* (cabang) dalam bidang fiqh. Misalnya masalah salat tarawih, doa *qunut*, dua azan dalam shalat Jum'at, dan lain sebagainya. Di samping itu perdebatan juga menyangkut apakah ijtihad merupakan keharusan semua

orang Muslim ataukah tidak, juga apakah pintu itihad telah tertutup ataukah masih terbuka lebar. Perdebatan masalah ini kemudian menjadi perbedaan yang mendasar antara Muhammadiyah dan NU.

Perbedaan yang paling signifikan tersebut terjadi pada model pendekatan penafsiran dan pemahaman Islam, meskipun kedua organisasi tersebut sebenarnya memiliki sumber ajaran yang sama, yaitu Alqur'an dan Sunnah. Muhammadiyah lebih menekankan pada upaya *tajdid* dan *ijtihad* secara bebas tanpa terkait dengan pendapat ulama lain dalam lapangan pemikiran keislaman dan menolak *taqlid* secara membabi buta terhadap pendapat ulama klasik. Di samping itu Muhammadiyah juga berusaha untuk memurnikan ajaran Islam yang dipengaruhi oleh *khurafat*, bid'ah dan takhayul dengan cara mengembalikan segala permasalahan kepada Alqur'an dan Sunnah Nabi secara langsung. Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah banyak diilhami dan dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pemurnian yang muncul di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Mesir dengan tokohnya Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Abduh, Rasyid Rida dan lain

sebagainya (Lubis, 1991:1-5). Karena itulah para peneliti sosial biasanya menyebut Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan keagamaan yang bercorak modernis.

Berbeda dengan Muhammadiyah, NU terlihat lebih berhati-hati, penuh rasa *ihtiyat*, dalam menafsirkan dan memahami Islam. Dalam bahasa yang lain, NU tidak secara langsung mengembalikan segala permasalahan kepada Alqur'an dan Sunnah, melainkan dengan cara merujuk kepada pendapat salah satu dari mazhab yang empat, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Bagi NU *tajdid* dan *ijtihad* perlu dilakukan, namun demikian diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi bagi ulama yang hendak melakukan ijtihad. Dalam memecahkan persoalan yang muncul di masyarakat, para ulama NU merasa lebih puas dengan merujuk kepada pendapat ulama-ulama masa lalu daripada berijtihad sendiri yang hasilnya belum tentu sesuai dan memuaskan (Bruinessen, 1995: 157-160). Berdasarkan ciri-ciri seperti itu, sebagian pengamat dan peneliti ilmu-ilmu sosial menyebut NU sebagai gerakan keagamaan yang bercorak tradisional. Pendapat demikian ada benarnya, sebab di samping cara berpikir (pemecahan masalah) yang bersifat

tradisionalis juga pada kenyataannya basis massa yang dimiliki NU sebagian besar adalah masyarakat pedesaan yang secara sosiologis disebut sebagai masyarakat tradisional.

C. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masa'il NU

1. Metode Ijtihad Majelis Tarjih

Pada dasarnya Muhammadiyah menetapkan hukum hanya berdasarkan Alqur'an dan Sunnah (hadis). Namun dalam prakteknya ketika menggunakan kedua sumber hukum tersebut tidak jarang ditemui banyak dalil (terutama hadis) yang nampaknya membicarakan satu masalah tetapi ketentuan hukumnya berbeda. Terhadap masalah ini biasa dilakukan metode *tarjih* terhadap dalil-dalil yang terdapat dalam kedua sumber hukum tersebut. Tarjih merupakan metode penetapan satu dalil yang paling kuat di antara dua buah dalil atau lebih. Apabila tidak ditemukan satu dalil pun mengenai suatu masalah, terutama permasalahan kontemporer, maka harus dilakukan metode ijtihad (Djamil, 1995: 76).

Metode ijtihad yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah melalui sumber-sumber hukum yang digunakannya adalah sebagai

berikut:

1. Alqur'an dan Sunnah

Muhammadiyah tetap memandang bahwa Alqur'an dan Sunnah *sahihah* adalah sebagai sumber hukum utama. Adapun fungsi Sunnah/Hadis Nabi, seperti dijelaskan oleh Majelis Tarjih, ada tiga macam: (1) Mengulangi ketetapan yang telah ada dalam Alqur'an; (2) Merinci ketetapan Alqur'an yang *mujmal* (bermakna global), menjabarkan atau mengkhususkan yang *'amm* (bermakna umum) dan menjelaskan yang *musykil* (sulit dipahami); (3) Menambah ketetapan yang belum ada dalam Alqur'an.

2. Ijma'

Menurut Ali (1996:264), dengan mengutip Himpunan Putusan Tarjih, *ijma'* telah dipakai dalam putusan Majelis Tarjih meskipun tidak disebutkan. Dalam hal ini adalah putusan mengenai masalah wakaf yang berisi bahwa seseorang dibolehkan menentukan wakafnya untuk orang lain, sekelompok orang, masjid, dan lain-lain, sesuai dengan kepentingan yang hendak dipenuhi oleh si pewakaf (*waqif*). Hal ini sesuai dengan *ijma'* ahli fiqih yang membolehkan berwakaf kepada sekelompok orang atau lembaga.

3. Qiyas

Untuk menghadapi persoalan-persoalan baru, sepanjang masa-

lah itu tidak berhubungan dengan ibadah *mahdah* dan tidak terdapat *nass* yang jelas dalam Alqur'an dan Sunnah, maka digunakanlah ijtihad melalui metode *qiyas*, yakni menentukan persamaan '*illat* hukum pada *nass* dengan peristiwa baru yang hendak ditentukan hukumnya. Namun demikian, sebagian anggota/ulama Muhammadiyah masih ada yang menolak *qiyas* sebagai metode penentuan hukum (Ali, 1996:99).

4. *Qaul Sahabat*

Bagi Muhammadiyah, pema-haman sahabat Nabi saw. terhadap lafaz *musytarak* pada salah satu artinya wajib diterima. Seperti perkataan Ibnu 'Abbas tentang arti lafaz *lamasa (lâmastumun-nisâ')* dalam surat An-Nisâ' ayat 43 adalah 'bersetubuh'. Selanjutnya, menurut Majelis Tarjih, hadis *mauquf* belaka tidak menjadi hujjah untuk menentukan hukum, kecuali kalau ada *qarinah* yang menunjukkan *ke-marfu'*-annya; tetapi *mursal shahabi* dapat dijadikan hujjah apabila ada *qarinah* yang menunjukkan bersambungannya sanad dan demikian juga halnya dengan *mursal tabi'i* (Ali, 1996:669).

5. *Istislah dan Istihsan*

Menurut Ali (1996:99), demikian juga dengan pendapat Djamil (1995:76-78), dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah metode *istis-*

lah dan *istihsan* belum diberikan perinciannya, namun dapat dipahami dari keputusan Tarjih seperti dalam masalah harta wakaf boleh dijual dengan alasan untuk menjaga kemaslahatan, yang pada hakekatnya hal ini juga tergolong *istihsan*.

6. *Sadd az-Zari'ah*

Metode *Sadd az-Zari'ah* ini juga belum ditemukan dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah secara formal, walaupun telah digunakan secara praktis, yaitu berkaitan dengan, misalnya, larangan wakaf untuk kepentingan hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau madarat (Ali, 1996:100).

2. Metode Ijtihad Bahsul Masa'il

NU merupakan organisasi sosial keagamaan yang berdasarkan paham *Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah* dan dalam bidang hukum/fiqih mengikuti empat mazhab, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, meskipun yang paling dominan dipraktekkan adalah mazhab Syafi'i dengan alasan paling sesuai dengan kondisi masyarakat Muslim Indonesia. Meskipun warga NU lebih memilih mazhab Syafi'i, namun hal seperti ini bukan berarti NU mengabaikan ajaran Rasulullah saw., sebab mazhab fiqh tersebut tetap berlandaskan Alqur'an dan as-Sunnah sebagai sumber po-

kok hukum Islam di samping *ijma'* dan metode *ijtihad qiyas* (Amin, 1996:82). Adapun alasan NU dalam bidang fiqh berpedoman kepada keempat—atau salah satu dari empat—mazhab tersebut, Muza-di (1995:70) mengungkapkan sebagai berikut: (1) Empat mazhab tersebut tercatat *manhaj-manhaj*-nya dan *aqwalnya* secara lengkap dan tertib; (2) Sudah berabad-abad diterima dan diikuti oleh mayoritas kaum Muslimin di seluruh dunia; (3) Tahan uji menghadapi kritik dan koreksi sepanjang sejarah; (4) Fleksibel atau lentur menghadapi tantangan dan perkembangan zaman; (5) Diyakini bahwa *manhaj* dan *aqwalnya* bersumber dari Alqur'an dan as-Sunnah yang dapat dipertanggungjawabkan.

NU menganggap bahwa karya-karya fiqh empat mazhab itu sebagai suatu karya yang *mu'tabar* dan isinya telah final. Artinya segala permasalahan hukum telah dibahas dalam karya-karya tersebut dan hasilnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal ini terkait erat dengan pandangan NU terhadap mata rantai perpindahan ilmu pengetahuan agama Islam yang tidak boleh terputus mulai dari Nabi Muhammad saw. ataupun para imam mazhab sampai generasi berikutnya.

Para ulama NU mengakui bahwa mereka saat ini berada pada tingkat *muqallid* (hanya ber-*taqlid*) terhadap para ulama pendahulu. Sudah barang tentu *taqlid* mereka melalui kitab-kitab *mu'tabar* merupakan *taqlid qauli*. Mereka memilih mengikuti pendapat yang sudah ada daripada melakukan *ijtihad* sendiri, dengan alasan *ijtihad* merupakan sesuatu yang sulit dipenuhi. Namun dalam dekade belakangan ini, NU melalui Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Lampung pada tahun 1992, membuka jalan untuk meningkatkan pengertian *taqlid*, dari *taqlid qauli* menjadi *taqlid manhaji*. Namun *taqlid manhaji* ini harus ditetapkan melalui *taqirir jama'i* oleh para ahlinya.

Adapun prosedur pengambilan keputusan hukum dalam Bahsul Masa'il NU, Masyhuri (1997:365-367) menggambarkan secara ringkas dan sederhana yang meliputi empat tahap, yaitu:

1. Dalam kasus ketika permasalahan hukum bisa dijawab oleh *'ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajh*, maka dipakailah *qaul/wajh* sebagaimana diterangkan dalam *'ibarat* tersebut.
2. Dalam kasus ketika permasalahan hukum bisa dijawab oleh *'ibarat kitab* dan di sana ter-

dapat lebih dari satu *qaul/wajh* maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajh*. Adapun cara melakukan *taqrir* itu melalui prosedur sebagai berikut: (1) Dengan mengam-bil pendapat yang lebih masla-hat dan/atau yang lebih kuat; (2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muk-tamar NU pertama bahwa per-bedaan pendapat diselesaikan dengan memilih: (a) Diusaha-kan untuk dikonsultasikan dengan kitab-kitab mazhab Syafi'i dengan prioritas yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i; (b) Bila terjadi perbedaan, maka yang dipe-gangi adalah Imam An-Nawa-wi; (c) Jika tidak dijumpai da-lam pendapat Imam An-Nawa-wi, maka yang dipakai adalah pendapat Imam Ar-Rafi'i; (d) Bila tidak dijumpai keduanya, maka dicari pendapat yang pa-ling banyak didukung oleh ma-yoritas ulama; (e) Jika tidak di-dapat lagi, maka dicari penda-pat ulama yang pandai dan yang paling *wara'*.

3. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajh* yang memberikan penye-lelesaian sama sekali, maka dila-kukan prosedur *ilhaq masa'il bi naza'iriha* secara *jama'i*.
4. Dalam kasus tidak ada *qaul/*

wajh sama sekali dan tidak mungkin dilanjutkan *ilhaq*, maka harus dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur ber-mazhab secara *manhaji*.

Siraj (1998:88) berpendapat bahwa berdasarkan Munas Alim Ulama NU di Lampung pada tahun 1992, NU sangatlah efektif ber-mazhab secara *qauli* jika masih memungkinkan dalam penetapan masalah-masalah aktual. Kemu-dian, demikian Siraj, jika tidak di-mungkinkan bermazhab secara *qa-uli*, maka diambil langkah dengan bermazhab secara *manhaji*. Tetapi jika tidak bisa juga dilakukan, ma-ka metode *istinbat jama'i* (kolektif) merupakan terobosan yang *brilian* bagi kelangsungan sistem *istinbat hukum* dalam lingkungan Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah.

Berkaitan dengan kewenangan berijtihad, dalam pandangan NU ijtihad hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memenuhi per-syaratan sebagai seorang *mujta-hid*, dan jika persyaratan ijtihad tersebut telah terpenuhi maka se-seorang tidak diperkenankan me-lakukan *taqlid*. Meskipun NU beru-saha menghindari ijtihad, tetapi dalam beberapa kesempatan ter-nyata NU melakukan ijtihad wa-laupun—menurut Noer (1995: 254)—dilakukanya “dengan berat hati”, terutama ketika NU dihadap-

kan pada persoalan-persoalan fiqh kontemporer yang tidak bisa dikembalikan kepada pendapat para ulama mazhab. Karena itulah dalam Munas Alim Ulama NU 1992 diputuskan untuk membuka kembali kemungkinan dilakukannya *istinbat*. Secara maknawi *istinbat* mempunyai pengertian yang sama dengan *ijtihad*. Hal ini merupakan lompatan baru di mana NU memulai tradisi baru penggunaan metode-metode *istinbat* hukum yang digunakan para *mujtahid*, akan tetapi NU juga membuat batasan bahwa metode ini hanya boleh dilakukan secara kolektif (*jama'i*) untuk mendapatkan hasil yang teliti dan lebih akurat.

Sebenarnya NU yang bersistem mazhab tidak mempertentangkan antara sistem *ijtihad* dan sistem *taqlid*, tetapi merangkai keduanya pada satu proporsi yang se-rasi, karena *taqlid* pada dasarnya juga merupakan hasil penggunaan sistem *ijtihad* oleh para *mujtahid*. Masing-masing sistem adalah sistem yang terbaik yang seharusnya digunakan oleh kaum Muslimin untuk mendapatkan ajaran Islam yang murni, karena tidak semua orang harus menggunakan sistem *ijtihad*, juga sebaliknya tidak mungkin orang menggunakan sistem *taqlid* kalau tidak ada pendapat yang diikutinya (Wahid, 1995:

158).

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sumber hukum yang digunakan oleh NU dalam menetapkan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Alqur'an dan Sunnah, dalam hal suatu ketentuan hukum secara jelas (eksplisit/*zahir*) sudah ditetapkan dalam *nass*.
2. *Asar/qaul* sahabat, dalam hal suatu ketentuan hukum tidak disebutkan dalam *nass* Alqur'an maupun Sunnah tetapi hanya ada pada *asar* sahabat.
3. *Qaul* ulama, yakni pendapat pendapat para imam mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
4. *Ijtihad*, dalam hal suatu peristiwa hukum baru yang belum pernah ditetapkan ketentuan hukumnya oleh ketiga sumber hukum di atas. Dalam hal ini, *ijtihad* bisa berupa *qiyas*, *istih-san*, *istislah*, *istishab* ataupun *sadd az-zari'ah*.

D. Analisis terhadap Metode Ijtihad Muhammadiyah dan NU

Dari uraian tentang metode *ijtihad* Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masa'il NU di atas, dapat disimpulkan bahwa ternyata

ada persamaan dalam penggunaan sumber-sumber hukum untuk melakukan ijtihad dalam rangka mencari penyelesaian hukum bagi masalah-masalah fiqh yang baru muncul di kalangan masyarakat modern (fiqh kontemporer). Persamaan itu terletak pada metode ijtihadnya, yaitu bisa berupa *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *istishab* dan *sadd az-zariah*.

Untuk lebih jelasnya, ijtihad hukum yang sama-sama digunakan baik oleh Muhammadiyah maupun NU akan dipaparkan berikut ini. Pada garis besarnya metode ijtihad hukum dapat dipetakan menjadi tiga, yaitu metode ijtihad berupa *istinbat bayani*, *istinbat ta'lili*, dan *istinbat istislahi* (Syalabi, 1981: 14).

Metode *istinbat bayani* adalah upaya penggalian hukum dari suatu *nass* dengan bertumpu pada kaidah-kaidah *lughawi* (kebahasaan). Di dalamnya dibahas antara lain makna kata (jelas tidaknya dan luas sempitnya makna sebuah kata), arti-arti perintah (*al-amr*), arti-arti larangan (*an-nahy*), arti kata secara etimologis, leksikal, denotatif, konotatif, cakupan makna kata (*musytarak*), dan lain sebagainya. *Istinbat bayani* ini digunakan terutama dalam kaitan dengan masalah ibadah (Syalabi, 1981: 14).

Istinbat ta'lili adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan '*illat hukum (ratio legis)*' yang terdapat dalam suatu *nass*. Permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya oleh *mujtahid* melalui penalaran terhadap '*illat*' yang ada dalam *nass* tersebut. Para ulama yang menggunakan metode ini beranggapan bahwa Tuhan mesti memiliki maksud dan tujuan (*maqasid asy-syari'ah*) tertentu ketika membuat sebuah ketentuan hukum. Maksud dan tujuan itulah yang dicari oleh para ulama *mujtahid* dalam melakukan ijtihadnya. Dalam perkembangan pemikiran ilmu Usul al-Fiqh, *istinbat ta'lili* ini dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: '*illat tasyri'i*', '*illat qiyasi*', dan '*illat istihsani*', sehingga ijtihad dalam bentuk ini bisa berupa *qiyas* maupun *istihsan* (Syalabi, 1981: 15).

Istinbat istislahi adalah upaya penggalian hukum yang menggunakan *nass* Alqur'an atau hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil dan bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari keduanya. Misalnya ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil, melarang melukai diri sendiri, dan bahwasanya setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Tujuan ayat-ayat tersebut adalah

untuk kemaslahatan secara umum. *Istinbat* ini dibedakan menjadi beberapa macam, seperti penggunaan metode *al-maslahah al-mursalah*, *sadd az-zari'ah*, *istishab al-hal*, dan *al-'urf* (Syalabi, 1981:16).

Dari uraian di atas terlihat bahwa ketika Muhammadiyah dan NU dihadapkan pada permasalahan-permasalahan fiqh kontemporer, terutama dalam bidang muamalah seperti masalah bank, asuransi, Keluarga Berencana, transplantasi organ tubuh dalam bidang kesehatan, kedua organisasi tersebut tidak bisa mengembalikan secara langsung pada Alqur'an maupun Sunnah Nabi atau juga kepada pendapat para ulama klasik, karena memang fiqh kontemporer merupakan permasalahan fiqh yang baru muncul di tengah-tengah masyarakat moderen yang secara eksplisit belum ada *nass*-nya dan juga belum pernah dibahas oleh para ulama masa klasik.

Dalam menghadapi persoalan hukum yang baru muncul tersebut, Muhammadiyah mau tidak mau harus menggunakan kaidah-kaidah *ijtihad* yang telah dibangun oleh para ulama masa lalu. Hal ini terlihat secara jelas ketika Muhammadiyah memutuskan hukum bank dan asuransi. Muhammadiyah menggunakan metode *qiyas* dengan cara menemukan *'illat*

yang terdapat pada bank maupun asuransi (Lubis, 1995:7-10). Demikian pula NU yang ternyata menggunakan kaidah-kaidah *istinbat* ulama masa lalu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fiqh kontemporer yang baru muncul tersebut. Dalam salah satu keputusan *Bahsul Masa'il* NU disebutkan tentang perlunya NU bermazhab secara *manhaji* untuk menyelesaikan kasus-kasus fiqh yang tidak bisa diselesaikan dengan bermazhab secara *qauli*, hal ini dipraktekan dalam keputusan *Bahsul Masa'il* mengenai hukum bank, asuransi, pencemaran lingkungan hidup, dan lain-lain (Tim Penyusun, 1993:6-8).

Dengan demikian terlihat adanya pergeseran pemikiran di antara kedua organisasi tersebut. Muhammadiyah melalui *Majelis Tarjih*-nya tidak merasa cukup dengan cara melakukan tarjih terhadap dalil-dalil yang nampak bertentangan untuk menentukan suatu hukum pada permasalahan fiqh kontemporer, sebab memang tidak ada dalil-dalil *nass* yang secara eksplisit membicarakan permasalahan tersebut. Demikian juga NU tidak dapat merujuk kepada pendapat para ulama mazhab karena mereka belum membicarakan hal tersebut secara eksplisit. Karena itulah baik Muhammadiyah

maupun NU harus melakukan *istinbat* hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang telah dibangun oleh ulama klasik.

E. Contoh Hasil Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masa'il NU Terhadap Permasalahan Fiqih Kontemporer

1. Bunga Bank

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga perekonomian modern yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi umat manusia modern secara keseluruhan. Sistem yang dimiliki oleh lembaga perbankan diatur sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai penghubung antara pemilik modal dengan pengusaha atau pengguna modal. Mengingat bank merupakan lembaga baru bagi hukum Islam dalam bidang muamalah, maka ia termasuk kategori *ijtihadiyah* yang perlu ditetapkan hukumnya. Baik Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih maupun NU melalui forum Bahsul Masa'il-nya, berusaha menyoroti dan membahas permasalahan perbankan tersebut dari sisi ilmu fiqh.

Baik Muhammadiyah maupun NU menganggap bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu

tempat untuk mempraktekkan bentuk-bentuk transaksi hutang-piutang. Oleh karena itu sebelum memutuskan hukum permasalahan tersebut, Majelis Tarjih dan forum Bahsul Masa'il berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum hutang-piutang (*al-qard*) dalam ilmu fiqh.

Majelis Tarjih Muhammadiyah berpandangan bahwa praktek hutang-piutang dalam perbankan mengandung unsur-unsur *riba*. Karena itu Majelis Tarjih membahas *nass-nass* yang berkaitan dengan *riba*. Bagi Majelis Tarjih, *riba* yang dilarang dalam Alqur'an pada hakekatnya adalah *riba nasi'ah* atau *riba* yang berlipat ganda. Sebab dalam *riba* tersebut terjadi unsur penghisapan kekayaan oleh pihak yang kuat (pemilik modal) terhadap pihak yang lemah (peminjam modal). Untuk mendukung argumentasinya, Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk kepada *nass-nass* yang berbicara tentang *riba* dan juga kepada berbagai tafsir baik klasik maupun kontemporer. Salah satu *nass* yang dikehendukannya ialah ayat 130 surat Ali 'Imran yang menyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Berkaitan dengan ayat tersebut, Majelis Tarjih merujuk kepada pendapat Rasyid Rida yang menyatakan bahwa larangan memakan *riba* adalah yang berlipat ganda. Jadi *riba* yang tidak berlipat ganda bukan termasuk *riba* yang dilarang sebagaimana *mafhum mukhalafah* ayat di atas. Meskipun Majelis Tarjih mengikuti pendapat Rasyid Rida tentang hukum *riba*, namun pada keputusannya tentang bunga bank (*interest*), Majelis Tarjih kelihatan ragu-ragu. Karena dalam keputusan itu dinyatakan bahwa hukum bunga bank adalah *syubhat*. Agaknya Muhammadiyah dengan keputusan Majelis Tarjihnya itu bermaksud menetapkan kehalalan bunga bank milik negara, tetapi tidak tegas menyatakannya dan mengambil sikap lebih berhati-hati (Djamil, 1995:126-130).

Terlepas dari keputusan tersebut, kelihatannya Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode *istinbat ta'lili* terutama *qiyas*. Dalam keputusannya tersebut terlihat secara jelas bahwa Muhammadiyah menganggap bahwa antara bunga bank dengan *riba* hampir memiliki '*illat* yang sama, yakni adanya unsur kelebihan harta (*ziyadah*) yang berakibat—sedikit atau banyak—munculnya pemerasan atau penghisapan kekayaan. Hanya karena keraguannya,

Majelis Tarjih tetap menganggap bahwa bunga bank adalah *mutasyâbihat* (termasuk masalah *syubhat*).

Berbeda dengan Muhammadiyah, NU melalui Syuriyah-nya yang bersidang dalam forum Bahsul Masa'il memutuskan untuk mengakomodasi tiga pendapat yang berkembang dalam sidang berkaitan dengan bunga bank dan bermuamalah dengannya. Tiga pendapat yang dimaksud adalah: pendapat yang menyamakan bunga bank dengan *riba* secara mutlak dan oleh karena itu hukumnya haram; pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan *riba*); dan pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan *riba* dan oleh sebab itu hukumnya boleh memanfaatkannya (Tim Penyusun, 1993: 12).

Pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank sama dengan *riba* berdasarkan dalil-dalil tentang haramnya *riba* seperti surat Ali 'Imran ayat 130 maupun surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode *istinbat* yang digunakan adalah metode *istinbat ta'lili*. Bunga bank dianggap sama dengan *riba* yang memiliki '*illat* penghisapan harta (eksploitasi) oleh orang yang kuat terhadap

orang yang lemah, karena itu bunga bank hukumnya haram.

Demikian pula dengan pendapat yang tidak menghalalkan dan tidak pula mengharamkan secara mutlak terhadap bunga bank, ia beralasan bahwa transaksi dalam bank dapat dikelompokkan ke dalam transaksi *qirad* atau *mudarabah* tetapi tidak sama persis, sama halnya bunga bank jika dianalogikan dengan *riba* ternyata juga tidak sama persis. Karena itulah maka ia termasuk masalah *syubhat*.

Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank adalah halal bernagagapan bahwa transaksi dalam perbankan dapat dianalogikan kepada akad *mudharabah* atau sistem bagi hasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hukum halal bunga bank tersebut telah diputuskan dengan menggunakan metode *qiyas*.

Karena NU hanya menampung tiga pendapat yang berkembang, pada akhir keputusannya NU, melalui forum Bahsul Masa'il, menganggap bahwa masalah bank dan bunganya adalah termasuk dalam kategori darurat. Karena itu bagi orang yang dalam usahanya tidak dapat melepaskan diri dari bank, maka hukumnya boleh (*mubah*) untuk melakukan akad/transaksi dengan bank. Sedangkan bagi mereka yang dalam usahanya dapat

berjalan dengan tanpa adanya keterlibatan bank, maka melakukan transaksi dengan bank hukumnya adalah haram (Tim Penyusun, 1993: 15-20).

2. Asuransi

Asuransi termasuk ke dalam permasalahan fiqih kontemporer yang dibahas baik oleh Muhammadiyah maupun NU. Asuransi, sebagaimana halnya bank, dikategorikan sebagai masalah *ijtihadiyah* karena fiqih-fiqih klasik tidak membicarakan permasalahan tersebut.

Pada intinya, Majelis Tarjih Muhammadiyah berpandangan bahwa asuransi ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam kalimat lain Majelis Tarjih tidak menghalalkan secara mutlak dan tidak juga mengharamkannya secara mutlak. Majelis Tarjih menghalalkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (Djamil, 1995:133-134).

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Majelis Tarjih menggunakan metode *istinbat ta'lili* dan *istislahi* sekaligus. Hal itu terlihat pada penggunaan *qiyas* untuk mempersamakan antara asuransi dengan *riba* yang memiliki *'illat* pemerasan atau peng-

hisapan harta oleh yang kuat terhadap yang lemah ataupun dengan judi yang memiliki 'illat spekulasi (untung-untungan). Meskipun demikian, Majelis Tarjih menganggap bahwa pada asuransi sosial tidak terdapat unsur tersebut. Adapun metode *istislahi* yang digunakan adalah metode *istishab*. Muhammadiyah menganggap bahwa karena tidak adanya dalil yang mengharamkan tentang asuransi maka ia termasuk mu'amalah yang diperbolehkan sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.

Hampir tidak ada bedanya dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, NU dalam keputusannya membolehkan asuransi sosial dan gotong-royong serta mengharamkan asuransi yang bersifat komersial, kecuali asuransi yang bersifat komersial tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan: memiliki unsur tolong-menolong; nasabah atau pemegang polis asuransi mempunyai niat untuk menabung dan bila pemegang polis belum bisa membayar ketika jatuh tempo maka hal itu dianggap sebagai hutang yang bisa dikembalikan pada setoran berikutnya (Tim Penyusun, 1993:25-26). Adapun alasan kebolehan asuransi yang bersifat sosial adalah karena ia tidak dapat digolongkan ke dalam akad *muaw-*

wadah yang mengandung unsur *gharar* dan/atau unsur judi yang memiliki sifat spekulasi. Bahkan dalam asuransi yang bersifat sosial terkandung unsur saling tolong-menolong dalam kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Islam.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa NU menggunakan metode *istinbat ta'lili* dan *istislahi* sekaligus. Asuransi sosial disamakan dengan transaksi *mudarabah*. Hal ini terlihat pada usaha NU untuk mengkiaskan asuransi dengan *mudarabah* yang memiliki unsur saling tolong-menolong. Sementara itu metode *istislahi* digunakan dengan alasan bahwa asuransi merupakan sesuatu yang darurat dan bersifat sementara, karena itu kebolehan menggunakan asuransi didasarkan pada hukum darurat tersebut sampai adanya asuransi yang didirikan oleh umat Islam dan sesuai dengan ajaran Islam (Tim Penyusun, 1993:25-26).

E. Penutup

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa baik Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya maupun NU dengan forum Bahsul Masa'ilnya, sama-sama telah menggunakan metode *ijtihad* ketika menghadapi permasalahan fiqh kontemporer. Majelis Tarjih

tidak lagi menggunakan metode *tarjih* dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang memang belum ditentukan atau disebutkan secara eksplisit dalam *nass*. Demikian juga halnya dengan NU, ia tidak lagi mengembalikan permasalahan hukum kepada fiqih klasik ataupun kepada salah satu mazhab karena memang permasalahan tersebut belum dibicarakan dalam fiqih-fiqih klasik. Oleh karena itu mau tidak mau NU harus menggunakan metode *ijtihad*.

Berdasarkan hal di atas, maka Muhammadiyah dan NU sama-sama menggunakan metode *ijtihad* yang dibangun oleh ulama klasik, dengan begitu kedua organisasi tersebut bisa dikatakan sama-sama melakukan *taqlid manhaji* terhadap ulama masa lalu. Kalaupun mungkin ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU dalam masalah fiqih kontemporer tersebut, maka hal itu terletak pada hasil akhir *ijtihad* mereka. Namun

dari kedua contoh kasus di atas terlihat bahwa kedua organisasi tersebut masih agak “canggung” dalam memutuskan permasalahan yang seharusnya dicarikan jawaban yang jelas dan tegas. Hal itu terlihat ketika Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menetapkan hukum bunga bank sebagai sesuatu yang *syubhat*. Sama halnya ketika forum Bahsul Masa’il NU yang tidak mampu menyamakan dan mengkompromikan pendapat yang ada tentang bunga bank. Ada pendapat yang tetap memandang bahwa bunga bank itu haram, ada yang menganggapnya *syubhat*, dan juga yang menganggapnya boleh (*mubah*). Kenyataan ini menunjukkan bahwa di antara mereka terdapat keraguan. Dengan demikian, dapat ditegaskan kembali bahwa antara metode *ijtihad* yang digunakan oleh Muhammadiyah dan NU tidaklah berbeda, yang berbeda hanyalah hasil dari *ijtihadnya* saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti. 1996. *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Amin, Masyhur. 1996. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraan*, Yogyakarta : Al-Amin Press.

- Bruinessen, Martin van. 1995. *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fealy, Greg, dan Greg Barton. 1997. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Antara NU dan Negara*, Yogyakarta: LKiS.
- Haidar, Muhammad Ali. 1994. *Nahdlatul Ulama dan Politik dalam Pendekatan Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ilyas, Yunahar. 1993. *Muhammadoyah dan NU: Reorientasi Wawasan*, Yogyakarta: LIPPI UMY & LKPSM-NU.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. 1994. *Sejarah Legislasi Islam*, terj. A.S. Djamaluddin, Surabaya : Al-Ikhlas.
- Lubis, Arbiyah. 1991. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Masyhuri, Aziz. 1997. *Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtar dan Munas Ulama NU Ke-1 s/d Ke-29 1994*, Surabaya: PP. Rabitah Ma'had Islamiyah dan Dinamika Press.
- Muzadi, Muchit. 1995. *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM-NU.
- Noer, Deliar. 1995. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*, Jakarta: LP3ES.
- Siraj, Said Aqil. 1998. *Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM-NU.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. 1981. *Ta'lil al-Ahkam*, Bairut: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah.
- Tim Penyusun. 1993. *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung*, Semarang: PBNU & Penerbit Sumber Barokah.
- Wahid, Abdurrahman. 1995. *Biografi Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: LTN-NU & Pustaka Pelajar.